

LAMPIRAN

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DI KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2016-2018**

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Bagaimana Implementasi Undang-undnagnomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara di Kota Yogyakarta tahun 2016-2018 ?

1. Komunikasi

- a. Apakah dalam mengimplementasikan Undang-undang, pelaksana sudah menyadari bahwa suatu keputusan kebijakan telah dibuat dan pelaksanaannya telah dikeluarkan ?
- b. Komunikasi seperti apa yang dilakukan untuk memberitahu para pelaksana bahwa kebijakan tersebut telah dibuat dan disahkan ?
- c. Apakah para pelaksana sudah memahami petunjuk pelaksanaan dengan baik dalam menjalankan kebijakan ?
- d. Bagaimana komunikasi kebijakan yang dilakukan dalam memberikan petunjuk pelaksanaan ?
- e. Perintah apa saja yang harus dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan ?
- f. Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap implementasi Undang-undnag Nomor 5 tahun 2014 terkait komunikasi ?

2. SDM

- a. Apakah SDM manusia dalam pelaksanaan implementasi sudah memiliki keahlian dan pengetahuan yang sesuai dalam melaksanakan kebijakan ?
- b. Standar seperti apa yang dibutuhkan untuk mencari SDM yang sesuai ?
- c. Bagaimana sistem yang dilakukan untuk memberi penjelasan agar SDM memahami tugas dalam mengimplementasikan Undang-undang tersebut ?
- d. Apakah dalam mengimplementasikan Undang-undang, SDM sudah melakukan dengan baik ?
- e. Apakah SDM mendapatkan sarana untuk menunjang operasionalisasi implementasi ?
- f. Sarana seperti apa yang digunakan untuk operasional implementasi yg dapat memudahkan dalam memberikan pelayanan implementasi kebijakan ?
- g. Faktorapajaja yang berpengaruh terhadap implementasi Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 terkaitSDM ?

3. Disposisi

- a. Dalam pelaksanaan kebijakan tentu pelaksana harus memiliki dedikasi pada kebijakan, dalam pelaksanaan implementasi tersebut apakah pelaksana sudah memiliki komitmen yang baik dan dapat

mendukung kebijakan yang telah di buat dan apakah para pelaksana sudah memiliki dedikasi pada kebijakan yang ditetapkan tersebut?

- b. Apakah ada kendala dalam pembuatan disposisi di dalam implementasi kebijakan?
- c. Pada pengangkatan birokrat apakah ada kecenderungan yang menimbulkan hambatan terhadap implementasi kebijakan?

4. Struktur Birokrasi

- a. Bagaimana SOP dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut?
- b. Apakah dalam melaksanakan kebijakan tersebut sudah sesuai dengan SOP yang di tentukan?
- c. Apakah pelaksana sudah memahami mengenai jelas tidaknya standar operasi ? Baik menyangkut mekanisme sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan itu sendiri.
- d. Apakah pelaksana sudah melakukan koordinasi dengan baik terhadap beberapa dinas yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan? Koordinasi seperti apa yang dilakukan?

DOKUMENTASI



Bersama bapak Sukidi, M.Si selaku Kasubbid AKD



Bersama bapak May Indra, S.Kom selaku Kasubbid & kesejahteraan



Tampak depan BKPP Kota Yogyakarta



Bagian laporan Tamu



Ruang sekretaris



Ruang Rapat Sida Luhur



Ruang Rapat Sida Mukti



Ruang Kepala BKPP



Ruang Kerja pegawai ASN